

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai hal-hal pokok yang disimpulkan dari kegiatan magang yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pemerintah.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang dan uraian- uraian dari bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Kegiatan magang yang dilaksanakan pada Dinas Pengelola Keuangan Dearah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk melihat bagaimana Administrasi Belanja Daerah Sumatera Barat.
2. Dalam melakukan Administrasi Belanja Daerah, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan masing-masing.
3. Untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun suatu laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran.
5. Total realisasi belanja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam tahun anggaran 2014 sebesar Rp.93.992.579.928,00. Jumlah tersebut mencapai 94,59% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.99.370.001.258,00.
6. Dari rincian di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat adanya permasalahan yang berarti, dimana kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target indikator kerja yang telah direncanakan.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu memperhatikan Administrasi Belanja Daerah dan Mengelola Secara Baik agar tepat sasaran dan bermanfaat untuk Kemandirian Daerah dan Negara.
2. Belanja Daerah merupakan salah satu penggerak roda perekonomian daerah diharapkan agar menempatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampuni dalam pengadministrasiannya.

